

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA - EVALUASI  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 239/PMK.09/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No.2165)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan secara berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN No. 3851); PP No. 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614); Perpres RI No. 29 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 80); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ruang lingkup Evaluasi atas Implementasi SAKIP terdiri dari evaluasi tingkat kementerian dan evaluasi tingkat Unit Eselon I. Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan terhadap komponen manajemen dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2017.